

Visioner

JURNAL PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA



Tuty Chadidjah

Reformasi Birokrasi sebagai Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat

Ikhbaluddin

Implementasi Kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung

Abdurohim

Kebijakan Bupati Rokanhilir Riau dalam Pemberian Bantuan Sosial Dana APBD di Kelurahan Bagankota untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Agung Nurachman

Implementasi Program Pendidikan Karakter di Kota Bandung

Annisa Rahmadanita

Hubungan Implementasi Program Bantuan DP2LPK dengan Pembangunan Periode 2008 s.d. 2011 (Studi di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan)

Hasna Azmi Fadhilah

Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, Jawa Tengah

Bertha Lubis

Membangun Kapasitas Pemerintah Kecamatan Jatinangor dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DI KOTA BANDUNG

Oleh

Agung Nurachman *)

ABSTRACT

The President of Indonesia has set up Inpres No. 1 Tahun 2010 to reaffirm about the Human Resource Development as the second priority related with the Priority of RPJMN 2010-2014. The priority of national education development then followed by the Character Building Program that wellknown as Program Pendidikan Karakter. The program was determined by the central government that take place and implement in the regional educational institutions

The methods that is used is non-participant observation. Data collection techniques are in the form of interviews, observations and documentation. In the other hand, informants that involved in this observation is the head of Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, the head of Dinas Pendidikan Kota Bandung, and the representation from a few schools in Kota Bandung.

Based on the observations, implementations of the program in Kota Bandung still facing a few obstacles such as that theres a few school that doesn't well inform about the program and also the other was face with very difficult way to implement the program. Beside of that, theres any employees that was not professional in bureaucratic structure to handle the educational program.

After all implementation of the program has been running well enough. In addition, the implementation could be further better if theres a good enough evaluation system with a more clear guideline and also making up the competitive employee promotion for better work in educational institution.

Keywords: implementations, 'Program Pendidikan Karakter', Bandung

LATAR BELAKANG

Dewasa ini dikenal sebuah adagium bahwa pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segalanya bermula dari pendidikan. Hal ini karena pendidikanlah yang akan membentuk *worldview* atau cara pandang yang benar bagi setiap individu, sebagai batu bata bangunan kolektif masyarakat, yang merupakan bangunan inti dari sebuah entitas bangsa.

Terlebih lagi dunia kita dewasa ini seolah haus akan kebangkitan era pendidikan, khususnya pendidikan terkait masalah moralitas. Hal tersebut karena telah mulai merebaknya masalah sosial yang mengkhawatirkan dalam skala global.

Situasi kemerosotan moral ini sebenarnya telah menjadi semacam ciri khas kultur abad ke-20.¹ Sehingga banyak pakar yang kemudian berusaha menggaungkan isu perbaikan pendidikan dalam berbagai dimensi.

Berbicara masalah pendidikan di Indonesia, yang menjadi pertanyaan mendasar kita saat ini sudahkah program-program pendidikan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta bagaimana perannya dalam merubah wajah peradaban masyarakat kita, khususnya para pelajar menjadi lebih baik.

Dan untuk melihat sejauh mana berjalannya berjalannya program pendidikan adalah dari jumlah sekolah yang telah memenuhi sekolah standar nasional (SSN). Ternyata untuk kategori

wilayah Jawa Barat sendiri beberapa tahun belakangan masih banyak sekolah yang belum masuk kategori SSN.²

Penyikapan gejolak pendidikan yang ada saat ini telah terlihat dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) untuk tahun 2010 hingga tahun 2014 yang tertuang dalam Perpres No. 5 Tahun 2010. Pada RPJMN 2010-2014 pemerintah berupaya memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menetapkan beberapa prioritas, antara lain urutan prioritas yang kedua adalah melakukan peningkatan sumber daya manusia, yang kemudian didukung dengan melakukan pembangunan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat daya saing dalam perekonomian.

Sebagai suatu langkah konkret bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan, juga bertolak dari rencana pembangunan nasional, maka berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2010 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini sudah mulai melakukan penerapan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan, dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga perguruan tinggi.

Program Pendidikan Karakter merupakan bentuk dari penjabaran RJMN yang diderivasi dalam Instruksi Presiden demi upaya memajukan bangsa lewat suatu instrumen pendidikan.

Mengingat peran pendidikan cukup strategis di tengah fokusnya pemerintah saat ini untuk melakukan pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka pembahasan mengenai implementasi Program Pendidikan Karakter akan memiliki nilai yang cukup menarik dan penting untuk dikaji.

Implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan juga merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.

Suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik pun, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.³

Untuk melihat bagaimana implementasi program pendidikan di lapangan, penulis mencoba mencari tahu bagaimana implementasi Program Pendidikan Karakter dengan melakukan observasi awal di Kota Bandung.

Ternyata Kota Bandung yang *notabene* merupakan kota pendi-

dikan yang sangat favorit di Jawa Barat, juga sebagai salah satu kota pendidikan yang terkenal di Indonesia, memiliki catatan yang cukup mengkhawatirkan.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelajar semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Bahkan untuk kalangan pelajar tingkat menengah ke atas sempat menduduki peringkat pertama dalam daftar jumlah tindakan kriminal. Serta untuk kategori usia remaja selalu menduduki posisi di tiga besar tindakan kriminal.⁴

Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa penjaga keamanan sekolah yang mengaku sekolahnya pernah mengalami beberapa kali serangan dari beberapa sekolah lain, sehingga perlu ditingkatkannya kewaspadaan di sekitar lingkungan sekolah.

Belum lagi terdapat sekolah-sekolah yang mengaku cukup sulit dalam mengimplementasikan Program Pendidikan Karakter di lapangan. Dan beberapa termasuk dalam kategori sekolah *cluster* menengah yang tentunya perlu mendapat perhatian.

Tentunya setiap institusi pendidikan, khususnya sekolah tidak dapat menjamin bahwa setiap anak didiknya dapat lulus dengan memiliki kepribadian yang beradab seutuhnya, tapi yang pasti mereka memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan pembinaan secara optimal kepada anak didiknya khususnya lewat

Implementasi Program Pendidikan Karakter.

Melihat di mana sasaran dari kebijakan yang merupakan suatu masalah yang ternyata masih terus berkembang dan belum terlihatnya suatu tanda penyelesaian, maka keberhasilan dari program tersebut masih perlu dikaji lebih jauh lagi.

Bila kita tinjau dari aspek implementasi program tersebut di lapangan oleh para pelaksananya, tampaknya masih dibutuhkan pembahasan lebih lanjut untuk menilai keberhasilan implementasi Program Pendidikan Karakter.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meyakini bahwa hal tersebut adalah sangat menarik untuk dibahas, dikaji, dan dianalisis, dalam rangka magang dan sekaligus mencari kejelasan informasi di lapangan.

Identifikasi masalah yang terdapat dalam implementasi Program Pendidikan Karakter di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, yaitu:

1. Masih banyaknya sekolah di bawah Standar Sekolah Nasional (SSN) di Jawa Barat
2. Tingginya tingkat kriminalitas remaja di Kota Bandung
3. Kerap terjadinya perkelahian pelajar SMA di Kota Bandung
4. Terdapatnya kesulitan dalam implementasi program pendidikan karakter di Kota Bandung
5. Kesimpangsiuran informasi terkait implementasi program

pendidikan karakter di Kota Bandung.

Berdasarkan identifikasi masalah, khususnya dalam kaitannya dengan program pendidikan karakter, penulis membatasi masalah dalam laporan ini tentang bagaimana implementasi program pendidikan karakter di level Sekolah Menengah Atas Negeri yang berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Mengacu pada pembatasan masalah di atas, rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Program Pendidikan Karakter di Kota Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi Program Pendidikan Karakter di Kota Bandung?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Pendidikan Karakter di Kota Bandung?

METODE PENELITIAN

Pengamatan sebagai suatu bentuk metode observasi dalam mengambil data dan informasi di lapangan. Penulis hanya sebagai pengamat kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung, pihak sekolah ataupun pihak yang terkait yang berhubungan dengan pengembangan dan implementasi Program Pendidikan Karakter.

TABEL Penjabaran Lingkup Pengamatan

Konsep	Aspek	Indikator
Teori Implementasi Edward III terhadap Implementasi Program Pendidikan Karakter di Kota Bandung	a. Komunikasi	a. Transmisi (Transmission) b. Kejelasan (Clarity) c. Konsistensi (Consistency)
	b. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia (Staff) b. Dana/ Anggaran/ Sarana Prasarana c. Informasi d. Wewenang (Authority)
	c. Disposisi	a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif
	d. Struktur Birokrasi	a. Internal Organisasi b. Eksternal Organisasi/ Fragmentasi

Sumber: Konsep Implementasi Edward III dalam Mubyarto, 1997: 164-168

Penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Adapun penjabaran terhadap ruang lingkup selengkapnya ada pada tabel di atas.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikannya menjadi tiga tingkatan huruf p dari bahasa Inggris, yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Yang termasuk person dalam pengamatan ini adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan implementasi Program Pendidikan Karakter,
2. *Place*, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa

keadaan diam dan bergerak. Dalam hal ini adalah instansi pendidikan di Kota Bandung yang terkait.

3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Adapun dalam hal ini adalah peraturan perundangan yang berlaku dan data-data dari instansi pendidikan terkait di Kota Bandung.

Data dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumber pengambilannya, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan objek pengamatan (informan), yakni dengan Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Seksi Kurikulum dari bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta Wakasek Kurikulum dari lima sekolah.

2. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung diambil dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Atau seseorang mendapat informasi dari orang lain, orang lain inilah yang mendapatkan data primer. Bila orang lain ini bercerita kepada kita, maka kita mendapatkan data sekunder.⁵

Adapun penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Melalui wawancara pengamat dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan guna mendapatkan data dan informasi terkait Implementasi Program Pendidikan Karakter.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di mana pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan.⁶

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik.⁷

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi rekaman dan gambar pada arsip Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan beberapa sekolah di Kota Bandung beserta foto dan rekaman yang berhubungan dengan pengamatan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa simpulan yang dapat diambil jika dilihat dari Teori Edward III sebagai berikut.

Komunikasi

1) *Clarity* (Kejelasan)

Terkait dengan implementasi Program Pendidikan Karakter, tampaknya masih terdapat kurang jelasnya aspek dalam kejelasan

komunikasi di dalam implementasi program pendidikan karakter. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kurangnya kemampuan dalam melaksanakan program tersebut secara optimal.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan penulis. Di mana hampir setiap sekolah memiliki penafsiran yang berbeda terkait dengan implementasi pendidikan karakter. Hal ini dapat pula terkait dengan petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas.

Adapun sekolah melakukan bentuk-bentuk inisiatif tertentu dalam implementasi di lapangan terkait hal tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan adanya supervisi dari para pengawas sekolah terkait implementasi program.

2) Transmision (Transmisi)

Transmisi dalam aspek implementasi Program Pendidikan Karakter berdasarkan data pengamatan penulis dinilai kurang dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat sekolah yang belum memahami bagaimana implementasi program tersebut seharusnya.

Hal tersebut ditambah adanya sekolah yang belum mendapatkan informasi secara baik dan utuh terkait implementasi Program Pendidikan Karakter. Sehingga hal ini dapat menjadi kendala dalam menyukseskan program tersebut.

Hal ini dipengaruhi pula terkait dengan mekanisme sosialisasi yang

dirasakan kurang dapat menjangkau dan memberikan arahan yang tepat. Dan dalam hal inilah kemudian para pengawas sekolah memiliki peran untuk mengatasi hal tersebut.

3) Consistency (Konsistensi)

Konsistensi dalam suatu kebijakan sangatlah penting. Hal tersebut mengingat disetiap lini birokrasi akan sangat mungkin terjadi distorsi terhadap suatu informasi kebijakan. Maka diperlukan suatu bentuk dalam menjaga keberlangsungan informasi secara konsisten, baik berupa sistem maupun konseptual.

Adapun di dalam agenda Program Pendidikan Karakter, tampaknya masih banyak *multi-perception* terkait dengan implementasi tersebut. Sehingga dalam hal ini tampaknya peluang setiap instansi pendidikan dalam melakukan ruang penafsiran kebijakan cukup terbuka lebar.

Berdasarkan hal tersebut yang didasari dari data pengamatan. Maka penulis menilai bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter tampaknya belum dapat dinilai cukup baik terkait dengan beberapa hal di atas.

Sumber Daya atau Sumber-Sumber

1) Staf

Staf merupakan istilah yang digunakan oleh Edward III sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu instrumen yang penting dalam imple-

mentasi suatu program. Karena dengan kualitas yang cakap dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mencukupi, maka suatu program dapat berhasil untuk diimplementasikan dengan optimal dan efektif.

Adapun dari pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa dalam rangka pengembangan kualitas para implementor kebijakan sudah cukup baik dengan adanya beberapa pelatihan yang telah dilakukan walaupun upaya tersebut tampaknya masih hanya bersifat secara general dan belum memperlihatkan suatu arah pengembangan yang spesifik.

Dikhawatirkan pula terjadinya suatu bentuk ketimpangan antara beban kerja yang semakin bertambah dihadapkan pada kuantitas implementor kebijakan yang stagnan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan program tersebut.

2) Dana

Dana adalah hal yang sangat krusial bagi implementasi suatu program. Karena tanpa adanya dana, tidak akan ada program yang dapat berjalan. Dan seringkali terjadinya hambatan program dikarenakan dana yang tidak memadai.

Dana yang dialokasikan untuk Program Pendidikan tampaknya masih belum dapat diukur oleh penulis melalui pengamatan yang telah dilakukan. Sehingga secara rinci belum dapat digambarkan secara jelas dan detail.

Untuk sumber utama dana didapat dari pemerintah pusat dalam rangka implementasi program pendidikan karakter melalui beberapa acara yang melibatkan beberapa sekolah sekaligus. Adapun sekolah melakukan penggunaan dana internal dalam implementasi harian sekolah tersebut.

Adapun alokasi dana untuk tingkat provinsi Jawa Barat sebesar 10 persen dari alokasi anggaran pendidikan dalam upaya untuk implementasi program pendidikan karakter dengan beberapa perwakilan sekolah di Jawa Barat sebagai *pilot project*.

3) Wewenang

Kewenangan atau Authority merupakan suatu bentuk instrumen dalam implementasi suatu program. Hal tentunya dikarenakan bila terdapatnya suatu program tanpa diiringi dengan pemberian kewenangan yang memadai, maka akan dapat menghambat dan mempersulit implementasi program.

Secara khusus dalam Program Pendidikan Karakter atau Pendidikan Karakter yang diberikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tampaknya masih hanya sebatas pembagian tugas pengawasan pada tim pengawas, di mana kejelasan tugas tersebut terkait penanganan implementasi Program Pendidikan Karakter masih belum terlihat secara rinci. Adapun dalam implementasi harian diserahkan sepenuhnya pada pihak sekolah.

4) Fasilitas

Fasilitas sebagai suatu instrumen pendukung implementasi suatu program, memainkan peran yang cukup perlu untuk diperhatikan. Hal ini mengingat kelancaran suatu program akan dapat dilihat dari sejauhmana fasilitas yang diberikan.

Sejauh ini fasilitas dalam Program Pendidikan Karakter hanya terdapat di sebagian sekolah. Sekolah lebih cenderung melakukan inovasi dan inisiatif yang dipadukan dengan berbagai kreasi dalam menunjang implementasi program tersebut.

Peran Dinas Pendidikan Kota Bandung hanya jelas terlihat ketika terdapat even terkait yang melibatkan beberapa sekolah dalam lingkup Kota Bandung. Sehingga hal-hal terkait sarana dan prasarana dibebankan pada sekolah masing-masing.

Adapun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya membantu fasilitas pada beberapa sekolah di Jawa Barat. Hal ini terkait dengan konsep sekolah *pilot project* yang tengah digarap dalam rangka implementasi Program Pendidikan Karakter tersebut.

Disposisi atau Kecenderungan

Dampak dari kecenderungan-kecenderungan adalah banyaknya kebijakan yang masuk dalam kategori “zona ketidakacuhan”. Hal tersebut terkait dengan adanya dukungan atau tidak dari para

pelaksana kebijakan terkait dengan adanya suatu kebijakan yang digulirkan atau program yang diimplementasikan.

Hal ini tergambar dari adanya sebagian sekolah yang harus berjuang lebih ekstra terkait dengan tambahan tanggung jawab yang berkorelasi dengan beban administrasi sekolah. Hal ini ditambah lagi kurang jelasnya pemberian informasi yang diberikan.

Dampak tersebut yang kemudian akan dikhawatirkan akan memberikan sekolah suatu hambatan yang dapat mengurangi kesiapan para pengajar dan pendidik dalam mencapai standar nasional pendidikan yang ditargetkan.

Struktur Birokrasi

Birokrasi memiliki modal yang baik dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan. Di mana kebijakan tersebut sebagai representasi dari pemecahan masalah sosial atau masalah publik pada umumnya.

Pada data yang didapatkan oleh penulis lewat pengamatan yang dilakukan, terdapat adanya indikasi penghambat dalam pelaksanaan suatu bentuk pelayanan terhadap dunia pendidikan. Hal tersebut terkait dengan sistem rekrutmen birokrat pada instansi pendidikan.

Hambatan tersebut dinilai dari tidak sedikitnya para birokrat yang hadir dalam instansi pendidikan tapi tanpa memiliki latar belakang sebagai seorang pendidik. Hal ini

yang kemudian menjadikan penghambat dalam implementasi program pendidikan, terutama terkait dengan Program Pendidikan Karakter.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari hasil pengamatan tentang Implementasi Program Pendidikan Karakter di Kota Bandung sudah dapat dikatakan cukup baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Adapun hal-hal tersebut terkait beberapa hal dari aspek-aspek hambatan dan pendukung sebagai berikut.

Faktor faktor yang menghambat Implementasi Program Pendidikan Karakter adalah:

- a. Adanya Sumber Daya Manusia yang masih kurang dalam segi kualitas. Hal tersebut terutama dirasakan pada level jajaran birokrasi di instansi pendidikan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kefahaman akan masalah pendidikan yang disebabkan tidak dimilikinya latar belakang pendidikan sebelumnya.
- b. Kurangnya kemampuan sebagian sekolah dalam memahami bagaimana implementasi Program Pendidikan Karakter. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kurang jelasnya bentuk-bentuk sosialisasi yang diberikan.

Di samping hal tersebut, bentuk pengawasan dari Dinas Pendidikan

di daerah juga belum memiliki kapasitas untuk dapat mengevaluasi guna kemudian mengarahkannya.

Adapun faktor yang mendukung dalam Implementasi Program Pendidikan Karakter yaitu:

- a. Keadaan dan kondisi lingkungan keluarga serta lingkungan sosial peserta didik yang baik sangat memengaruhi karakter siswa didik tersebut, sehingga hal tersebut berpengaruh pada kemudahan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah.
- b. Untuk tinjauan internal sekolah sendiri sebagai implementor kebijakan, adanya sarana dan fasilitas untuk organisasi, peribadatan, kebersihan serta kemampuan sekolah dalam menerjemahkan dan mengaplikasikan program tersebut sangat berperan sebagai daya dorong implementasi program yang berhasil.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Program Pendidikan Karakter adalah dengan melakukan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, melakukan berbagai kegiatan pendampingan, meningkatkan kapasitas pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bandung serta melakukan berbagai bentuk usulan dalam upaya perbaikan kinerja pegawai serta promosi kenaikan jabatan.

Adapun saran dari hasil pengamatan tentang Implementasi Program Pendidikan Karakter di Kota Bandung tertuang berikut ini.

1. Sebaiknya pemerintah pusat lebih melakukan penggambaran konsep kebijakan secara lebih jelas, serta memberikan suatu arah dan panduan yang dibutuhkan bagi para implementor kebijakan juga turut aktif dalam proses pemantauan implementasi kebijakan tersebut.
2. Untuk pengangkatan birokrat sebaiknya didasari sesuai dengan pengalaman, keahlian dan latar belakang yang dimiliki seseorang, khususnya dalam lingkup pendidikan.
3. Untuk perkembangan karir pegawai serta promosi, sebaiknya dilihat dari sejauhmana kinerja yang dimiliki oleh seseorang, sehingga diperlukan suatu bentuk pengukuran kinerja yang jelas dan terukur, terlebih di instansi pendidikan.

(Footnotes)

- 1 West C. *The Moral Obligations of Living in Democracy Society* dalam D. Bastone dan E. Mendieta dalam bukunya *Good Citizens*, (1999: 5)
- 2 Hal ini berdasarkan observasi awal penulis di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- 3 Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: P. T. Buku Seru, (2009: 177)
- 4 Data Reserse Kriminal Polisi Wilayah Kota Besar Bandung yang diambil saat observasi awal oleh penulis.
- 5 Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press, (2006:86)
- 6 Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, (2006: 220)
- 7 *Ibid*, hal: 222

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan)*, Rineka Cipta: Jakarta
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- M. Natsir. 1973. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nawawi, Hardadi, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Badung: Alfa Beta

- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Sukmadinata, Nana. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Syafril, Wirman dan Israwan Setyoko, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2009. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: P. T. Buku Seru

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Agenda Prioritas Pembangunan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Pendidikan Nasional*
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung*.

*) Agung Nurachman, S.STP adalah Staf Fakultas Politik Pemerintahan IPDN